

Judul : Disetujui DPR jadi Hakim MK, Inosentius diminta jangan hantam DPR
Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Disetujui DPR Jadi Hakim MK

Inosentius Diminta Jangan Hantam DPR

Komisi III DPR menyetujui Inosentius Samsul menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test* Rabu (20/8/2025). Persetujuan tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini.

USAI mengetuk palu tanda persetujuan. Ketua Komisi III DPR Habiburokhan mengatakan, Inosentius merupakan calon tunggal yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Komisi III DPR. Inosentius memenuhi syarat administratif sebelum mengikuti uji kelayakan itu.

Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Inosentius memaparkan visi dan misinya untuk MK ke depan. "Setelah itu, dia juga diberi beberapa pertanyaan oleh sejumlah Anggota Komisi III DPR yang hadir," terang Habiburokhan di Komplek Parlemen, Jakarta.

Dia juga memastikan, Inosentius bukan calon titipan, tapi merupakan satu-satunya sosok yang diusulkan. DPR berhak mengusulkan dua atau hanya satu calon hakim MK. "Bukan titipan lagi, ini memang calon

kami. Anda baca tadi ya di ketentuan Undang-Undang (UU) MK, ini calon yang diusulkan DPR," katanya.

Habiburokhan menjelaskan pemilihan Inosentius sebagai calon tunggal hakim konstitusi menggunakan mekanisme penjurian aktif. Jika ada sosok lain yang ingin mendaftar lagi DPR hendak memilih Inosentius, maka diadial yang tetap akan dipilih.

Mekanisme tersebut dilakukan seperti talent scouting, dan lazim dilakukan untuk perekrutan dalam posisi apa pun. Untuk itu, dia mendorong panitia seleksi untuk lembaga-lembaga lainnya

agar aktif melakukan perekrutan dengan mencari orang-orang yang punya kualitas, dengan tak sekadar menunggu pendaftaran. "Kalau orang yang tidak mau daftar, kita dorong, kita endorse untuk daftar," katanya.

Dalam *fit and proper test*, anggota Komisi III Safaruddin mengingatkan Inosentius agar tidak melupakan asal usulnya sebagai calon hakim pilihan DPR. "Pokoknya kami akan memperjuangkan sebagai utusan DPR. Tapi setelah sampai di MK lupa bahwa bapak itu dipilih dari DPR," ujar Safaruddin.

Dia mengatakan, dari sembilan hakim MK, tiga di antaranya merupakan pilihan dari anggota DPR. Dia meminta agar Inosentius tidak menghantam atau melawan DPR. Maksudnya, agar Inosentius punya keyakinan kuat, keteguhan, dan bukan membela sembarangan di DPR.

"Tapi kan bapak jangan lupa bahwa bapak dipilih itu dari DPR, jangan kembali menghantam DPR Pak," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Safaruddin juga meminta Inosentius agar teguh pendirian dan tidak goyah. "Cuma kadang-kadang nanti di sana ada pengaruh kiri kanan bapak bisa goyang-goyang, dan saya minta bapak teguh dalam pendirian menghadapi hakim-hakim yang

lain," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi III Rudianto Lallo berharap proses ini bisa melahirkan hakim yang mampu menjaga peran MK sebagai *the guardian of constitution*, sekaligus sebagai penjaga demokrasi. Jangan ada lagi Hakim MK membuat keputusan-keputusan yang menimbulkan polemik atau kegaduhan di masyarakat.

Rudianto menyoroti beberapa putusan MK yang dinilai melampaui kewenangannya. Salah satunya adalah keputusan terkait pemilu nasional dan lokal yang dinilai "mengunci" ruang gerak pembentuk UU, yakni DPR bersama Pemerintah. "MK sejatinya hanya berwenang melakukan pengujian terhadap UU, bukan membentuk norma baru. Kalau membentuk norma, itu kewenangan Pemerintah dan DPR," ujar politikus Partai NasDem itu.

Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menambahkan, proses uji kelayakan dan kepatutan merupakan momentum penting memastikan kualiti

tas hakim konstitusi yang akan mengawal tegaknya konstitusi negara. "Integritas itu tidak cukup hanya jujur saja. Orang jujur, tapi tidak punya kapasitas dan kompetensi bisa berbahaya," ucap Soedeson.

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu menyoroti pentingnya kemampuan calon Hakim MK dalam membedakan antara *constitutional rights* dan *open legal policy*. Dua konsep ini sering kali bersinggungan tipis sehingga berpotensi menimbulkan persoalan besar jika tidak dipahami dengan benar.

"Kalau salah memahami, negara bisa kacau. Hakim MK harus tahu benar mana hak konstitusional warga negara dan mana ranah kebijakan hukum terbuka," katanya.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, pihaknya akan mengambil keputusan terkait persetujuan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Hakim MK pada rapat paripurna hari ini. Menurut rencana, rapat paripurna akan digelar pada siang hari pukul 13.00 WIB. ■ PYB